



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I DEWA TAGEL WIRASA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 880750

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.079.040.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 661.800.000
2. Tanah Seluas 1.220 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, WARISAN Rp. 43.920.000
3. Tanah Seluas 540 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, WARISAN Rp. 19.440.000
4. Tanah Seluas 7.530 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, WARISAN Rp. 271.080.000
5. Tanah Seluas 2.360 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 82.800.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 253.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SEDAN / BALENO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000
3. MOBIL, MITSUBISHI JEEP/STATION WAGON Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 165.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 68.188.487

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.565.228.487



III. HUTANG

Rp. 74.975.453

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.490.253.034

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.